



**PRIORITAS UNTUK RUANG TERBUKA PUBLIK**  
**Pengadaan Lahan Hanya 2 Lokasi**

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Pemkot Yogyakarta kembali melakukan pengadaan lahan untuk kepentingan publik. Tapi pada tahun ini dalam APBD 2019 pengadaan hanya untuk dua lahan dengan prioritas fungsi ruang terbuka hijau publik. Jumlah itu menurun dibandingkan pengadaan lahan di 2018.

"Dalam APBD murni 2019 hanya ada dua titik pengadaan lahan karena sesuai kemampuan anggaran. Prioritas untuk ruang terbuka hijau publik," Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Senin (14/1).

Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau itu ada di wilayah Gedongkiwo dan Giwangan. Total alokasi anggaran untuk pengadaan lahan itu dari APBD 2019 sekitar Rp 1,8 miliar.

Untuk lahan di Gedongkiwo luasan sekitar 200 meter persegi dengan alokasi Rp 651 juta. Sedangkan pengadaan lahan di Giwangan seluas sekitar 400 meter persegi dengan alokasi Rp 1,2 miliar.

Dia menyatakan rencananya pengadaan lahan itu dilakukan pada triwulan kedua tahun 2019. Pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke pemilik lahan dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengusulkan pembelian lahan untuk ruang terbuka hijau publik. Termasuk mekanisme pengadaan dan penentuan harga harus melalui penilaian appraisal.

"Kami sudah lakukan sosialisasi dan klarifikasi ke pemilik lahan dan LPMK setempat Terutama mengenai harga harus sesuai appraisal," tambahnya.

Pihaknya mengakui pengadaan lahan pada APBD murni 2019 ini lebih sedikit dibandingkan pengadaan lahan tahun 2018. Pada tahun 2018 pengadaan sekitar 23 lahan dengan anggaran mencapai sekitar Rp 103 miliar. "Memang sangat jauh dengan APBD tahun lalu. Tapi karena pengadaan berdasarkan kemampuan

anggaran daerah," ujar Hari.

Menurutnya sebenarnya ada kebutuhan pengadaan lahan untuk fasilitas perkantoran. Tapi karena keterbatasan anggaran di APBD murni 2019 dan prioritas ruang terbuka hijau publik, sehingga tidak dianggarkan. Pihaknya berharap pada APBD Perubahan 2019 ada kemampuan keuangan daerah, sehingga pengadaan lahan dapat diperbanyak. Termasuk usulan pengadaan 3 lahan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas publik yang gagal pada tahun 2018.

"Yang tahun kemarin gagal, asalnya dari LPMK ada lahan yang akan dijual dan diusulkan, kami akan tindaklanjuti. Tapi masuk usulan di APBD Perubahan," ucapnya. (Tri)-a

Instansi

- .....
- .....
- .....
- .....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005